

## **CONCEPT OF “BAKU MASUK” AS A SYMBOL OF THE CULTURE OF HARMONY IN AMBON**

**Nurlaila Tuanany<sup>1</sup>, Abdul Manaf Tubaka<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama IAKN Ambon

<sup>2</sup>Program Studi Sosiologi Agama IAIN Ambon

lailatuanany@gmail.com

### **Abstract**

*This paper aims to describe how the dominant culture of the Ambonese can be used as a symbol of harmony in cultural plurality and ethnic pluralism in Ambon City. The cultural plurality that has been segregated through knowledge of territorial and geographical boundaries as a differentiator can be overcome through the "Baku Masuk" culture where ethnic diversity in Ambon City can borrow from each other as a form of willingness to accept differences and at the same time be united in differences and henceforth made into as the public culture of every ethnic entity in Ambon City. This paper has found that the "Baku Masuk" culture which is practiced in Ambon City has become a solution for a harmonious life. This paper recommends the need for local culture as a basis for strengthening public culture to be practiced in a plural society.*

**keywords:** culture of harmony, baku masuk, dominant culture, ambon city

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana budaya dominan orang Ambon dapat dijadikan sebagai simbol harmoni dalam pluralitas budaya dan kemajemukan etnis di Kota Ambon. Pluralitas budaya yang selama ini tersegregasi melalui pengetahuan batas teritorial dan geografis sebagai pembeda, justru dapat diatasi melalui budaya “Baku Masuk” di mana keragaman etnis di Kota Ambon dapat saling meminjam satu sama lain sebagai bentuk kerelaan menerima perbedaan sekaligus dapat menyatu dalam perbedaan dan selanjutnya dijadikan sebagai budaya publik dari setiap entitas etnis yang ada di Kota Ambon. Tulisan ini telah menemukan bahwa budaya “Baku Masuk” yang dipraktikkan di Kota Ambon telah menjadi solusi bagi kehidupan harmoni. Tulisan ini merekomendasikan perlunya budaya lokal sebagai basis penguatan budaya publik untuk dipraktikkan dalam masyarakat plural.

**kata kunci:** budaya harmoni, baku masuk, budaya dominan, kota ambon

### **PENDAHULUAN**

Harmoni budaya dalam keragaman etnis penting untuk didialogkan lagi dalam konteks keragaman budaya yang diikat dalam fondasi ke-bhineka tunggal ika-an. Dalam negara Indonesia kontemporer, negara bangsa dengan beragam suku, agama dan antar golongan yang dulu dikenal secara jelas dalam batas-batas teritorial geografis telah mengalami pemudaran batas-batas teritorial budaya masyarakat Indonesia tersebut.

Realitas kemajemukan dan pluralitas budaya telah mengalami intensitas perjumpaan sehingga kebudayaan dapat dipertukarkan menjadi milik bersama. Dalam konteks itu, wujud dari mencairnya batas-batas kultural itu perlu menjadi suatu kreasi budaya yang menegaskan kohesi sosial antar budaya melalui interaksi sosial yang intens. Pierre Bourdieu (1977) mengatakan bahwa *Our model of culture is a pluralized or 'distributional' one. It assumes that culture is*

*not the undivided property of the whole society, but is instead subject to contestation and divergent interpretation. As a result, rather than being homogenous, patterns of culture meaning tend to vary across society in interesting ways.*

Pluralitas budaya yang saling meminjam satu sama lain mencerminkan suatu usaha kreatif sekaligus solusi dalam mencegah berbagai permasalahan yang terjadi. Hal ini perlu ditegaskan sebab selama ini realitas kemajemukan suku, agama, ras, dan antar golongan selalu menghadirkan wajah konflik, ketimbang harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini dipahami dan dipraktikkan hanya melayani kehendak mayoritas yang dikendalikan untuk kepentingan rezim kekuasaan. Padahal, keindonesiaan kita dihidupi oleh pluralitas suku, agama, ras, dan antar golongan yang memiliki keunikan budaya masing-masing. Meng-ika-kan kebhinekaan justru menanam potensi konflik dan perpecahan bagi bangsa Indonesia dalam arus perubahan yang begitu cepat. Sejak awal pembentukan nasionalisme kebangsaan Indonesia, perasaan primordial dari berbagai entitas organisasi etnis yakni, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Celebes, dan lain sebagainya, tidak secara otomatis hilang, oleh karena kebangsaan yang dibangun hanya untuk tujuan politik yakni momentum merebut kemerdekaan Indonesia. Karena itu, dalam perjalanan kebangsaan Indonesia, masih ditemukan adanya keinginan untuk pisah diri dari negara kesatuan.

Lebih dari 500 suku bangsa di Indonesia merupakan pernyataan yang jelas untuk menunjukkan keragaman budayanya yang mencakup bahasa, agama, ilmu pengetahuan, kekerabatan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang dipraktikkan pada tingkat lokal. Gerakan "persatuan dan kesatuan" yang dijalankan selama ini bukan sekadar menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut dalam suatu

wadah yang memungkinkan kebersamaan tercapai; lebih dari itu telah menjadi cerita buruk tentang pembatasan ekspresi budaya dalam berbagai bentuk.

Kalau gejala tersebut dianggap sebagai bagian dari biaya yang harus dibayar, maka biaya itu menjadi terlalu mahal karena akibat-akibat yang ditimbulkannya telah menjadi drama buruk bagi cita-cita persatuan itu sendiri. Dalam arti tertentu, lepasnya Timor Timur menjadi negara merdeka merupakan contoh yang paling jelas tentang kegagalan cita-cita tersebut. Gerakan kemerdekaan semacam itu belum juga selesai dihadapi bangsa Indonesia, karena di Riau, Aceh dan Papua, kelompok yang menginginkan kemerdekaan masih belum berhenti berjuang. Pada aras yang lain, Ambon merupakan contoh lain tentang salah arus kebudayaan yang telah dan sedang terjadi di Indonesia. Konflik sosial yang melibatkan isu etnis atau agama tertentu masih juga berlangsung, yang menjadi perbendaharaan yang lengkap tentang bagaimana jalan panjang cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia berlangsung (Abdullah, 2003:2).

Lalu bagaimana keragaman budaya dapat saling hidup secara bersama dalam ekspresi keunikan budaya masing-masing? Tentu menjadi persoalan kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki lebih dari 500 suku bangsa. Kenyataan Indonesia yang menyediakan luasnya hamparan keragaman budaya dalam konsep kesatuan bangsa Indonesia menuntut suatu strategi kebudayaan yang menghargai prinsip primordial kesukubangsaan yang ada. Indonesia adalah situs arkeologi kebudayaan yang berlapis dan beragam, yang dapat merangkum sekitar 25 abad kehidupan umat manusia secara serempak (Yudi Latif, 2015:93).

Keinginan dari upaya merumuskan kehidupan pada basis keragaman suku bangsa ini adalah keharmonisan. Harmoni kena mengena dengan belajar meminjam,

memahami, memaknai dan disertai kerelaan menghormati perbedaan budaya dari setiap tindakan sosial. Hal ini bermakna suatu capaian dari usaha belajar manusia dalam membentuk suatu tatanan sosial (*social order*) bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, konsep harmoni secara kreatif dikonstruksi secara aktif untuk menemukan keseimbangan tujuan atau kepentingan bersama. Dalam posisi itu, setiap budaya dari beragam etnis mampu menemukan titik temu dalam kerangka belajar meminjam keunggulan budaya lain.

Model budaya plural diandaikan bukan sebagai properti individual atau komunal an sich sebagaimana disentil oleh Bourdieu (1977), tetapi menjadi budaya publik (*public culture*) sekaligus pada saat yang sama menjadi gerakan politik budaya publik (*politics of public culture*). Hal ini penting, sebab pada saat yang sama, kebudayaan suku bangsa menjadi penanda bagi identitas etnis maupun agama dari beragam budaya yang hadir dan hidup bersama-sama. Konstruksi pemahaman semacam ini menjadi kerangka acuan bagi upaya menemukan konsensus baru dari kebhinekaan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Dalam konteks itu, konsep harmoni meniscayakan tiga aspek penting yakni, kesediaan menerima perbedaan, respek terhadap budaya orang lain, dan bersedia berkolaborasi secara bersama dalam semangat perbedaan. Kesediaan menerima perbedaan menjadi konsep yang sangat kompleks disebabkan oleh tiga hal. Pertama, perbedaan (*diversity*) adalah konsep yang secara natural adalah hak dasar yang melekat pada setiap entitas budaya. Dalam konteks itu, setiap orang, baik secara individu maupun komunal memiliki nilai diri secara unik dan merepresentasikan keunikan budaya yang dimiliki.

Realitas hidup masyarakat yang plural secara etnis dan agama tentu menjadi tantangan tersendiri bagi upaya merumuskan

tatanan sosial yang harmoni. Tantangan tentu dialamatkan pada sesuatu yang baru dari perjumpaan beragam budaya dari keragaman entitas primordial. Kedua, perbedaan menjadi penanda keragaman untuk terus eksis, tetapi pada saat yang sama mengalami dinamika yang mengharuskan upaya merekonstruksi identitas dalam dialektika budaya dominan (*dominant culture*). Dialektika kebudayaan ini berkaitan erat dengan negara kepulauan yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Ketiga, penerimaan perbedaan memberikan konsekuensi struktural maupun kultural yang akan menyasar pada aspek keadilan ekonomi, politik, pendidikan, dan agama.

Dinamika kebudayaan yang terkait dengan budaya dominan tentu memberikan gambaran yang tidak tunggal. Oleh karena setiap daerah memiliki karakteristik budaya dominan yang berbeda-beda. Dalam konteks itu, kota Ambon menjadi fokus kajian ini untuk melihat bagaimana kebudayaan Ambon dapat memberikan ruang harmoni dalam dialektika keragaman etnis. Modernisasi pembangunan telah merubah segalanya, termasuk perwajahan kota Ambon. Kota Ambon sekarang menjadi kota yang sangat padat penduduk di provinsi Maluku. Karena itu, kota Ambon sendiri merupakan wilayah yang sangat padat penduduk atau *population boom* di wilayah Indonesia Timur (Triyono:2001). Pulau Ambon sebagaimana digambarkan oleh Subyakto (2010) merupakan salah satu pulau dari kepulauan Maluku, suatu kepulauan yang terletak antara pulau Papua di sebelah timur, pulau Sulawesi di sebelah barat, lautan Teduh di sebelah utara dan lautan Indonesia di sebelah selatan. Kota Ambon bukan hanya dihuni oleh etnis Ambon saja, yang terdiri dari orang Seram, Buru, Lease, Banda, Kepulauan Sulu, Kei, Aru, Tanimbar, Barbar, Leti dan Wetar, tetapi juga etnis Makassar, Bugis, Buton, Jawa, Sumatera, China, dan sebagainya.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keharmonisan dari

pluralitas etnis di kota Ambon dengan menggunakan pendekatan budaya dominan orang Ambon yang termanifestasi dari simbol budaya “baku masuk”,. Selanjutnya, bagaimana kesukubangsaan dimaknai sebagai suatu normative work untuk dijadikan acuan bagi kehidupan harmonis di kota Ambon.

## **METODE**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, di mana fenomena budaya harmoni diperlihatkan melalui simbol “Baku Masuk” pada masyarakat plural di Kota Ambon. Untuk mempersempit cakupan bahasan ini, maka tulisan ini menggambarkan secara umum bagaimana konsep “Baku Masuk” dipertimbangkan sebagai instrumen budaya harmoni. Pembacaan yang intens dilakukan untuk mendalami makna konsep Baku Masuk dalam budaya orang Ambon dijadikan sebagai instrumen dalam menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Keseluruhan proses tersebut kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kota Ambon dari masa ke masa**

Abad ke-16 yang lalu, perbukitan kota Ambon dipenuhi embun tebal, sehingga membuat kota itu terlihat elok dan indah dipandang mata. Perbukitan yang asri dengan jumlah penduduk yang belum begitu padat, membuat daerah ini menjadi area yang nyaman untuk dihuni. Seperti biasanya, tak bisa melawan hukum alam, pemandangan alami yang tumbuh dan berkembang, digerakan oleh mekanisme alami selalu menghadirkan kecantikan yang menggoda selera mata. Membayangkan suasana di saat itu, ibarat menghadirkan cerita fiksi tentang tujuan hidup secara alami dalam nuansa alam yang menghidupi. Apakah imajinasi semacam itu tak bisa dihadirkan dalam semangat zaman modernisasi ini? Tentu saja mungkin, tetapi tetap tak sama dalam nuansa.

Bisa karena menghadirkan kota dan menghidupkan kembali imajinasi adalah dua hal yang menyatu seperti sekeping mata uang. Kota menghadirkan nuansa arsitektur ruang kemodernan, dan imajinasi menghadirkan kerinduan akan perbukitan nan indah di masa lampau.

Fakta perbukitan embun tebal itulah cikal bakal pemberian nama bagi kota Ambon. Tetapi sumbernya belum bisa dipastikan. Karena itu, asal muasal nama kota Ambon dari kata ombong atau embun masih menjadi perdebatan untuk mengatakan belum final. Pendaratan bangsa Portugis tahun 1513 menjadi awal kemunculan kota. Pemandangan embun tebal di perbukitan memunculkan suatu konsep tentang realitas yang diamati sehingga portugis memberi nama bagi daerah ini dengan sebutan Apono. Penyebutan ini selalu berkaitan dengan karakteristik daerah tersebut yang lazim dilakukan oleh bangsa penjajah. Misalnya penyebutan orang Batak (kasar) oleh bangsa Jerman adalah penanda bagi karakteristik orang di wilayah Sumatera Utara. Begitu pun dengan sebutan Alifuru yang dalam bahasa Portugis disebut Alfor atau orang yang tidak bisa diatur. Nama bagi kota Ambon juga diistilahkan dengan nama Laha yang dipakai untuk menamai Benteng Nossa Senhora da Anunciada yang menjadi cikal bakal kota yang dibangun pada tahun 1575. Dalam bahasa setempat, laha diartikan sebagai pelabuhan (Wikipedia).

Segera setelah Portugis menyerah kalah dari Belanda pada tahun 1605, Belanda kemudian mengganti nama benteng kota Laha itu dengan nama Victoria. Pada masa Hindia Belanda, Kota Ambon mulai dimodernisasi. Kota Ambon, tepatnya Casteel Victoria menjadi ibu kota dari Government Amboina, salah satu dari tiga government yang terletak di antara Sulawesi dan Irian yang membentuk administrasi pemerintahan yang bernama Gouvernement

der Molukken yang dibentuk pada 1817. Selain itu, pada tanggal 7 September 1921 masyarakat Kota Ambon diberi hak yang sama dengan pemerintah kolonial. Hal ini menjadi wujud perjuangan masyarakat Indonesia dari Maluku. Hal ini pun merupakan kekalahan politik penjajah karena warga Ambon pun menjadi bisa berperan dalam pemerintahan dengan irama yang sama dengan politik penjajah masa itu. Dengan demikian, masyarakat kota terbekali modal dalam menentukan masa depannya (Wikipedia). Ada dua peristiwa penting bagi awal dimulainya penetapan kota Ambon. Pertama, dimulai pada saat Portugis membangun kota Laha dengan benteng Nossa Senhora da Anunciada tahun tanggal 25 maret 1575 dan kedua, penyerahan kedaulatan kepada masyarakat kota Ambon oleh Belanda pada tanggal 7 September 1921. Dalam penetapan kelahiran kota Ambon, diambil dua waktu yang berbeda yakni tanggal dan bulan diambil pada masa Belanda, sedangkan tahunnya dimulai pada saat Portugis membangun benteng. Mungkin ini bagian dari sikap akomodatif atas dua peristiwa penting bagi kota Ambon tersebut.

Kota Ambon kemudian menjadi kota sejarah, kota peperangan dan juga kota perdagangan yang dibangun atas nama hasrat berkuasa. Dari kota ini, peradaban masyarakat Kota Ambon dibangun dengan dinamika dan dialektika sejarah yang cukup melelahkan. Kota tentu menjadi penanda dimulainya peradaban modern, tetapi sekaligus menyimpan masalah dalam dirinya sendiri (*anamy in the mirror*). Sebagai gambaran dari kota-kota yang ada di Indonesia, Parsudi Suparlan (2008:145) menjelaskan bahwa kota-kota pada masa sekarang, termasuk kota-kota di Indonesia, telah yang berkembang sedemikian rupa karena fungsinya sebagai pusat-pusat industri atau pertumbuhan ekonomi pasar dalam program pembangunan nasional, sehingga

bukan saja sebagai pusat-pusat peradaban tetapi juga berkembang sebagai pusat kebobrokan peradaban dan derajat kemanusiaan manusia, kehancuran lingkungan, pemujaan terhadap uang secara berlebihan, dan kerakusan yang mencerminkan ungkapan kuno *homo homini lupus*.

Parsudi (2008) menjelaskan hal tersebut, sebagai pembeda bagi awal pertumbuhan kota-kota di Indonesia, termasuk bagaimana perkembangan dan dinamika kota Ambon. Kota Ambon mula mula, warga kota Ambon memiliki ciri dengan keramahan dan standar kebaikan yang jelas dimiliki oleh warga kota. Warga kota yang dimaksud adalah mereka yang memiliki tanah dan petuanan serta orang-orang yang dimerdekakan pada saat penjajahan. Warga kota Ambon yang sejak awal telah dihuni oleh berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi gambaran bagaimana relasi sosial terbangun dalam kehidupan masyarakat kota Ambon. Relasi sosial tentu saja digerakan oleh budaya dominan dari masyarakat kota Ambon yang memiliki petuanan atau penguasaan tanah adat. Karakteristik masyarakat adat kota Ambon disimbolkan dalam istilah “malu hati”. Malu hati menggambarkan suatu sikap dan perasaan untuk menghargai sesama, baik yang muda kepada yang tua, maupun sebaliknya dan hal itu bisa digunakan dalam bentuk hubungan dengan kekerabatan, maupun dalam berelasi dengan para pendatang atau dalam istilah lokal disebut dengan istilah “orang dagang”.

Implikasi dari simbol budaya “malu hati” itu terlihat dari sikap dan tindakan orang-orang Ambon asli dalam memberikan tempat bagi para pendatang. Orang-orang Ambon asli memiliki penguasaan atas tanah yang bisa digunakan untuk menerima dan menampung orang dagang. Dalam relasi sosial yang demikian, terjadi apa yang kita sebut sebagai relasi resiprositas yang bertumpu pada

pandangan hidup “malu hati”. Realitas ini menjadi bangunan pola relasi sosial masyarakat kota Ambon mula mula. Pola relasi antara “orang asli” dan “orang dagang” sejak awal dilakukan dengan memberikan tempat tinggal berupa sebidang tanah untuk tinggal dan bisa menjadi lahan tanah untuk ditanami. Selain tanah, konsep bapak piara juga menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat Maluku pada umumnya. Situasi sosial yang demikian, membuat konsep “ale rasa beta rasa” menjadi kuat dioperasionalkan dalam relasi masyarakat asli dan pendatang.

Kedekatan semacam ini tentu menegaskan budi untuk selalu dekat dengan orang asli. Begitu pun sebaliknya, secara rasional, “orang dagang” dituntut untuk memberikan sebagian hasil panen kebun mereka kepada orang asli yang telah memberikan tanah kepada mereka atau menjadi bagian dari kerabat dekat orang Ambon. Dalam konteks itu, permainan budi dan rasionalitas menjadi penjelasan bagi kuatnya relasi sosial pada masyarakat kota Ambon. Budi menuntun pada kebaikan orang lain, dan rasionalitas menegaskan suatu relasi pertukaran yang fungsional bagi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bahkan, dalam perjalanannya, ada semacam kebutuhan untuk menjadikan hubungan-hubungan semacam itu diangkat ke level yang lebih kuat yakni rekonstruksi makna Pela. Pela yang tadinya hanya berkaitan dengan sesama orang asli Ambon Salam dan Sarane, diperluas kepada orang-orang di luar orang asli Ambon.

Dalam perkembangan laju pertumbuhan ekonomi kota Ambon dengan berbagai permasalahan pembangunannya, hubungan-hubungan itu mulai mengalami interupsi, tetapi tidak hilang. Relasi semacam itu dikonstruksi menjadi model dialektika relasi yang sangat simbiosis mutualisme. Sebagaimana kota-kota lainnya, kota Ambon telah menjadi ibu kota provinsi Maluku dengan fasilitas perkantoran, pendidikan, dan

pusat bisnis yang menjanjikan. Situasi ini mengundang mobilitas orang dan barang yang sangat intens, sehingga merubah wajah kota Ambon sebagai kota migran.

Kota yang telah dihuni oleh berbagai macam etnis dan agama ini berada pada wilayah leitimur. Kota ini pernah mengalami konflik yang melibatkan etnis dan agama selama 4 tahun. Tetapi konflik berdarah itu mampu diselesaikan dengan menggunakan kekuatan kearifan lokal orang Maluku. Atas usahanya itu, kota Ambon dinominasikan menjadi kota terbuka bersama 29 kota lainnya di Indonesia. Kota ini dijuluki kota migran, juga karena pemerintah menjadikan Maluku sebagai daerah transmigrasi. Pemerintah menyadari hal itu, sehingga ada keinginan menjadi keharmonisan dalam kebhinekaan, maka ada upaya membangun perkampungan multietnis.

### **Baku Masuk sebagai Simbol Budaya Harmoni orang Ambon**

Kosa kata “Baku” bagi orang Asli Ambon Maluku memiliki keunikan makna tersendiri. Kata ini menjadi luas dalam penggunaannya dan bersifat mendua. Karena itu, kata “Baku” digunakan dalam serangkaian tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Kata baku dalam pengertian positif seperti misal, “baku sayang, baku masuk, baku tagor, baku lia, baku jaga, baku inga, baku janji, baku sangaja. Sementara untuk hal-hal negatif misalnya, baku pukul, baku lempar, baku potong, baku hina, baku pisah, baku hantam dan sebagainya. Relasi sosial orang Ambon yang damai dan harmoni tergambar dalam istilah ini. Istilah ini memadatkan realitas yang konflikktual, sekaligus juga situasi harmoni dalam relasi-relasi sosial.

Relasi-relasi sosial etnis dan agama sering mengalami ketegangan dan untuk menggambarkan situasi kembali normal, digunakanlah kata baku masuk. Hal ini

menggambarkan relasi konfliktnal Islam Kristen di Maluku yang secara teritorial tersegregasi, tetapi pada saat yang sama mereka saling merindukan satu sama lain sebagai orang basudara dalam ikatan kekerabatan Pela Gandong (PG), Bongso, Ade Kaka, Patasiwa Patalima, Lorsiu Lor Lim, Aini Ai.

Hatib (2017) menjelaskan bagaimana praktek baku masuk dalam budaya Maluku dengan analogi menenun yang menghubungkan garis dari masing masing benang dari arah yang berlainan. Menenun berarti menggabungkan berbagai garis benang yang berbeda, namun tujuannya untuk mengikat rapat dan saling bersambungan. Di dalam relasi etnis dan agama, masing-masing konstituen mempunyai garisnya. Namun demikian, simpul masing-masing kelompok saling mengikat dan membentuk perbedaan yang terus berkelanjutan.

Pola relasi semacam ini menjadi fungsional bagi kelangsungan hubungan dialektis dan harmonis pada masyarakat multi etnis di kota Ambon. Konstruksi budaya baku masuk melibatkan tatanan adat, tetapi pada saat yang sama juga menggunakan rasionalitas dari hubungan saling memberi dan menerima. Dalam situasi semacam itu, setiap entitas etnis yang ada di Ambon berada dalam relasi-relasi yang sangat kompleks, tetapi dapat menemukan jalan untuk mengisi kekosongan dari kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat kota Ambon.

Dalam struktur masyarakat kota Ambon, yang terdiri dari keberagaman etnis, dan sub-etnis Ambon berada dalam kerangka baku masuk untuk memuluskan tindakan-tindakan yang saling menguntungkan bagi masyarakat. Organisasi etnis di kota Ambon meneguhkan identitas diri, tetapi selalu dalam upaya untuk memberikan manfaat bagi sesama dalam relasi yang saling menguntungkan. Di kota Ambon, banyak sekali organisasi etnis dan

subetnis. Misalnya organisasi Jawa, Madura, Bugis, Makassar, Manado, Sumatera, Buton. Selain organisasi etnis tersebut, terdapat juga organisasi sub-etnis Ambon. Tetapi penekanannya lebih kepada organisasi sub-etnis berbasis negeri (desa), dan wilayah teritorial. Misalnya organisasi sub-etnis Iksamuni, Lease, Hena Hitu, Hatuhaha, Evav, dan lainnya. Sub-etnis disebutkan, sebab dalam relasi sosial, identitas etnis selalu dapat dibedakan, sehingga penyebutan sebagai satu etnis, tetapi pada saat yang sama, ada pembeda untuk mengatakan tidak sama dengan yang lain.

Dalam keragaman etnis dan agama semacam itu, masing-masing saling memberikan kemanfaatan dalam relasi sosial. Dalam prakteknya, terdapat berbagai macam transaksi sosial ekonomi yang menjadi jembatan baku bae di antara berbagai macam etnis di kota Ambon. Transaksi sosial dalam bentuknya yang lain adalah hubungan bapa piara, anak piara dan lain sebagainya. Selain celah baku masuk yang bersifat taktis, ada juga celah yang diikat oleh hubungan kekerabatan dari pola relasi Islam dan Kristen dalam tatanan sosial berbasis kearifan lokal. Dalam konteks itu, kebudayaan menjadi aktif untuk dapat didayagunakan bagi kohesi sosial masyarakat yang majemuk.

Keragaman etnis tidak selalu menjadi hambatan dalam membangun kehidupan harmonis, sebagai kata kerja, kebudayaan selalu menghadirkan ruang alternatif bagi upaya menenun jahitan baju kebudayaan yang sobek. Dalam proses menenun tersebut, berbagai macam sukubangsa dapat saling memberi manfaat ketimbang mendatangkan malapetaka bagi kehidupan bersama. Tentu pemetaan terhadap permasalahan keragaman budaya bukan terletak pada perbedaan itu sendiri, tetapi lebih kepada pemenuhan hak-hak dasar yang berkaitan dengan aspek keadilan, kemiskinan, yang semua itu berada pada dinamika struktur kekuasaan. Keragaman budaya mestinya menjadi berkah

bagi kemajuan suatu bangsa. Karena itu, saling memberikan aspek kemanfaatan dalam relasi kesukubangsaan menjadi mendesak untuk dilakukan. Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia mestinya menjadi contoh bagi sinergitas keragaman budaya yang ada di nusantara. Karena itu, Edie Lembong (2015) menghadirkan gagasan brilian tentang Penyerbukan Silang antarbudaya (Cross Cultural Fertilization) sebagai titik temu keragaman budaya dan agama. CCF sebagai metode sekaligus sebagai epistemologi bagi upaya memecahkan permasalahan konflik sosial antar etnik dan agama.

### **KESIMPULAN**

Harmoni kebudayaan dalam keragaman etnis adalah ruang bagi upaya mewujudkan kelangsungan relasi sosial dalam masyarakat majemuk. Kemajemukan etnis dan agama harus dilihat sebagai sesuatu yang *given*. Sebab mempertentangkan keragaman etnis sama dengan melawan hukum sunnatullah. Karena itu, keragaman etnis menandakan perbedaan yang dalam situasi demikian, konflik selalu hadir. Tetapi kehadiran konflik, perlu dilihat sebagai upaya protes atas tatanan sosial (social order) yang timpang. Konflik yang demikian menjadi sehat, sebab ia

mengembalikan tatan sosial yang seimbang bagi kelangsungan relasi-relasi sosial itu sendiri.

Kehadiran ruang perjumpaan yang dihuni oleh berbagai macam etnis dan agama yang diatur dalam model negara bangsa memang kerap kali menuai konflik, tetapi pada dasarnya perjumpaan itu untuk memberikan nilai tamba bagi kebudayaan itu sendiri. Konflik hanya ada, jika intensitas perjumpaan tidak didasarkan pada upaya belajar memanfaatkan satu sama lain bagi kemajuan bersama. Karena itu, tidak ada hubungan antara keragaman etnis dan konflik itu sendiri. Konflik dimunculkan sebagai akibat dari pertentangan atas sumber daya yang dimanipulasi bagi kepentingan segelintir orang, dan mengorbankan ruang keharmonisan.

Dengan demikian, keragaman etnis di kota Ambon memberikan nuansa dan dinamika tersendiri. Sebab konstruksi kebudayaan yang cair dan aktif untuk menghadirkan pola relasi dalam tuntunan budaya dan kreasi yang menarik. Kreasi budaya yang disimbolkan dalam istilah-istilah lokal Ambon.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, I. (2003). Politik bhinneka tunggal ika dalam keragaman budaya indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(2), 1-13.
- Abdul Kadir, H. (2017). *Dialektika Baku Masuk Islam Kristen di Maluku*.
- Latif, Y. (2015). *Silang Budaya bagi Kemajuan Bangsa.*, dalam *Penyerbukan Silang Antarbudaya Membangun Manusia Indonesia*, Jakarta.
- Rukmana, A., & Lembong, E. (2015). *Penyerbukan Silang Antarbudaya: Membangun Manusia Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Kompatindo.
- Suparlan, P., Chryshnanda, D. L., & Syafri, Y. (2008). *Dari masyarakat majemuk menuju masyarakat multikultural*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK).
- Subyakto. (2010). *Kebudayaan Ambon, dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* di redaksi oleh Koentjaraningrat. Jakarta: Djambana
- Trijono, L. (2001). *Keluar dari kemelut Maluku: refleksi pengalaman praktis bekerja untuk perdamaian Maluku*. Pustaka Pelajar.